



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN WILAYAH DI PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2010-2016

Retty Yusniar

Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, 50275

rettyyusniar@students.undip.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze how much influence regional income, labour force and human development index have on regional inequality in South Sulawesi Province during 2010-2016. The province of South Sulawesi was chosen because based on the data from the provincial statistics center, it showed significant economic growth in 2016. The data used in this study used data from the statistical center of South Sulawesi Province. The data analysis method used in this study is Index Williamson method. The results of this study indicate that the Labor Force variable shows a positive and significant influence on regional inequality. Regional income variables have a negative but significant effect on regional inequality, while the human development index variable has no effect on regional inequality in South Sulawesi.

Keyword: Government and Growth, Institution and Growth, Employment, Unemployment

Kode Klasifikasi JEL: O43, O44, O47, E24

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2017) kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2016 tumbuh 5,02% lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,88%. Struktur ekonomi Indonesia pada tahun 2016 secara spasial masih didominasi oleh kelompok propinsi dipulau Jawa dan Sumatera. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan sebuah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan disuatu wilayah. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang dan disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2010). Dalam proses pemerataan pembangunan ekonomi, Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki karakteristik wilayah yang berpotensi mempengaruhi terciptanya pola pembangunan ekonomi yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan terjadinya ketidakseragaman dalam pembentukan pola pembangunannya. Ketidakseragam ini mampu melahirkan pertumbuhan yang tidak merata yang pada



gilirannya dapat mengakibatkan beberapa wilayah tumbuh dengan cepat sementara wilayah lain tumbuh dengan lambat.

Secara fungsi, pembangunan wilayah jika ditinjau dari integrasi nasional adalah untuk membina dan mengefektifkan keterhubungan antar wilayah yang berspesialisasi secara fungsional dan berorientasi pada pasar secara nasional (Adisasmita, 2014). Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar yang meliputi struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006).

Seiring bergulirnya waktu ditemui polemik antara pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan pembangunan yang berimbang guna menciptakan keadilan dimasyarakat. Meskipun awalnya diduga pemerataan akan tercapai apabila terjadi pertumbuhan. Namun realitas tidak mengatakan demikian. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi disuatu wilayah tidak serta merta menimbulkan pertumbuhan yang sama didaerah lainnya.

Ketimpangan muncul karena adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Sehingga kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda. Ketimpangan juga memberikan implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah yang akan mempengaruhi formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah (Sjafrizal, 1997). Berangkat dari kondisi tersebut diatas, pembangunan harus diarahkan bukan hanya pada area pertumbuhannya namun juga meliputi aspek pemerataan dan keberlanjutannya dimasa mendatang. Tidak adanya pemerataan dalam proses pembangunan akan mengakibatkan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah. Ketimpangan antar daerah ini tentu saja dapat menimbulkan kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang semakin tajam (Adisasmita, 2014). Masih menurut Adisasmita, daerah-daerah yang mengalami keterbelakangan atau tertinggal mempunyai ketergantungan yang kuat terhadap daerah luar.

Dari definisi pembangunan dan ketimpangan wilayah serta karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan, bagaimana kita melihat laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Sulawesi Selatan sebagai *center point* pertumbuhan ekonomi dari kawasan Indonesia bagian timur? Jika berkaca pada data tahun



2016, perekonomian di Propinsi Sulawesi Selatan mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,41% atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada level 7,17% (BPS Sulsel, 2017). Akan tetapi peningkatan PDRB perkapita yang cukup tinggi tidak merata terjadi diseluruh Propinsi Sulawesi Selatan. Angka PDRB hanya didominasi oleh beberapa kota saja seperti Kota Makassar, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Pangkep. Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya hanya dapat menghasilkan sedikit pendapatan saja. Hal inilah yang kemudian berpotensi menimbulkan masalah yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji ketimpangan wilayah di Propinsi Sulawesi Selatan. Perbedaan PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 PDRB Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bantaeng	1,832.00	2,181.00	2,537.00	4,337.70	4,936.80	5,604.33	6,283.89
Barru	1,666.00	1,904.00	2,190.00	3,816.79	4,396.91	4,942.60	5,467.88
Bone	7,530.00	8,836.00	10,373.00	16,656.17	19,739.12	23,283.47	26,414.53
Bulukumba	3,763.00	4,286.00	5,045.00	7,170.12	8,345.26	9,568.06	10,855.71
Enrekang	1,921.00	2,292.00	2,681.00	4,121.14	4,617.89	5,240.38	5,901.55
Gowa	5,082.00	5,931.00	6,791.00	10,702.76	12,001.82	13,752.44	15,503.91
Jeneponto	2,274.00	2,676.00	3,095.00	5,358.35	6,139.98	7,000.78	7,877.17
Luwu	3,718.00	4,351.00	5,030.00	7,679.83	9,006.39	10,362.57	11,932.79
Luwu Utara	3,068.00	3,571.00	4,156.00	6,339.52	7,558.98	8,697.36	9,791.38
Maros	2,598.00	3,039.00	3,496.00	11,885.15	14,750.54	15,602.77	17,891.56
Pangkep	5,379.00	6,413.00	7,677.00	13,508.09	15,921.63	18,484.42	20,617.28
Pinrang	5,291.00	6,217.00	7,238.00	9,847.32	11,358.26	13,142.34	14,792.04
Kep. Selayar	1,132.00	1,386.00	1,709.00	2,879.79	3,463.52	4,148.07	4,685.98
Sidrap	3,367.00	4,216.00	4,933.00	6,937.94	8,036.28	9,304.93	10,772.99
Sinjai	2,814.00	3,235.00	3,716.00	5,600.99	6,482.80	7,517.57	8,312.55
Soppeng	2,728.00	3,209.00	3,691.00	5,401.13	6,176.04	6,843.17	7,935.79
Takalar	2,055.00	2,368.00	2,750.00	4,962.95	5,809.96	6,820.89	7,755.77
Tana Toraja	1,472.00	1,794.00	2,190.00	3,701.18	4,267.52	4,907.41	5,484.92
Wajo	5,409.00	6,656.00	7,736.00	11,620.59	13,568.44	15,118.52	16,540.50
Pare Pare	1,796.00	2,074.00	2,377.00	3,938.49	4,428.05	5,061.82	5,544.66
Makassar	37,007.00	43,428.00	50,702.00	88,169.95	100,026.50	114,309.18	127,623.17
Palopo	1,947.00	2,285.00	2,638.00	4,180.46	4,743.86	5,351.08	5,910.79
Luwu Timur	8,294.00	9,670.00	10,466.00	16,623.15	20,363.59	19,211.24	19,057.11
Toraja Utara	1,499.00	1,821.00	2,204.00	4,248.57	5,045.16	5,880.06	6,822.15

Sumber: BPS, 2017



TINJAUAN PUSTAKA

Sejumlah teori dan model analisa telah dikembangkan untuk menjelaskan terjadinya ketimpangan dalam ekonomi. Teori yang menjelaskan fenomena ketimpangan yakni Teori Kuznet (1955) dengan hipotesis U terbaliknya. Teori ini menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan antar wilayah meningkat pada awal fase pembangunan ekonomi kemudian menurun seiring proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Ketimpangan kemudian mulai membesar dikarenakan terjadinya kesenjangan antar sektor modern dan tradisional yang meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena perkembangan disektor modern lebih cepat dibandingkan dengan sektor tradisional. Akan tetapi dalam jangka panjang, ketika kondisi ekonomi mencapai tingkat kedewasaan dengan asumsi mekanisme pasar bebas dan mobilitas semua faktor-faktor produksi antar negara tanpa sedikitpun rintangan, maka perbedaan dalam laju pertumbuhan *output* antar negara akan cenderung mengecil bersamaan dengan tingkat pendapatan perkapita. Dengan laju pertumbuhan rata-rata yang semakin tinggi disetiap negara pada akhirnya akan menghilangkan kesenjangan. Banyak faktor yang mempengaruhi ketimpangan suatu wilayah. Myrdal dalam Jhingan (1990) mengatakan bahwa ketimpangan yang terjadi dalam suatu wilayah dikarenakan besarnya dampak balik (*backwash effect*) yang ditimbulkan dibandingkan dengan dampak sebar (*spread effect*). Dampak balik berupa perpindahan modal atau investasi menyebabkan ketimpangan semakin besar antara wilayah lainnya.

Ketimpangan wilayah menurut ILO adalah perbedaan performa ekonomi dan kesejahteraan antar wilayah. Pendapat lain dikemukakan oleh Karin Vorauer (2007), bahwa ketimpangan wilayah adalah ketidakseimbangan struktur spasial didalam wilayah atau antar wilayah. Menurut Sirojuzilam (2005) Ketimpangan yang terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga terjadi terhadap pembangunan antar daerah didalam wilayah suatu negara. Ketimpangan harus dinilai dari beberapa aspek seperti sosial, kondisi lokasi, politik, administrasi, kelembagaan, lingkungan, infrastruktur umum, dan lain-lain (Gajdos, 2006).

Pendekatan tradisional yang hanya menilai ketimpangan dari segi ekonomi saja dianggap kurang baik dalam menjelaskan ketimpangan tersebut. Menurut



Kutscherauer, dkk (2010), ketimpangan wilayah dapat dilihat dari dua perspektif yaitu perspektif vertikal dan horizontal. Perspektif vertikal melihat ketimpangan dari sudut administratif, contohnya ketimpangan ditingkat eropa, ketimpangan ditingkat nasional dan ketimpangan ditingkat lokal. Sedangkan perspektif horizontal melihat ketimpangan dari sisi aspek yang mempengaruhinya seperti aspek sosial, ekonomi dan fisik.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data panel yaitu gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Data yang digunakan meliputi data Indeks Williamson yang merupakan ukuran ketimpangan wilayah, pendapatan asli daerah (PAD), angkatan kerja (AK), dan indeks pembangunan manusia (IPM). Data dalam objek penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dinas atau instansi terkait serta literatur yang dapat menunjang penelitian ini.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Variable Dependen

Yakni Indeks Williamson yang terjadi di Propinsi Sulawesi Selatan pada kurun waktu 2010-2016. Menurut Sjafrizal (2012) Indeks Williamson merupakan ukuran ketimpangan pendapatan untuk menganalisis seberapa besar kesenjangan antar wilayah. Variabel tersebut dinyatakan dalam satuan persen (%).

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD), angkatan kerja (AK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) di Propinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2010-2016.

a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No.33 tahun 2004 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dipungut berdasarkan peraturan



daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Variabel tersebut dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).

b. Indeks Pembangunan Manusia

IPM menurut Bappenas yaitu indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks yang terdiri dari indeks harapan hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, indeks pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta indeks standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan atau paritas daya beli (BPS, 2017). Variabel IPM dinyatakan dalam satuan persen (%).

c. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah jumlah penduduk dengan usia kerja yang termasuk didalamnya penduduk yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan definisi usia kerja adalah tingkat usia seseorang yang sudah dapat bekerja serta memperoleh pendapatannya sendiri. Adapun penduduk yang telah memasuki tingkat usia kerja adalah bagi mereka yang berusia minimal 15 tahun hingga 65 tahun berdasarkan ketentuan pemerintah Indonesia. Variabel AK dinyatakan dalam satuan jiwa.

d. Ketimpangan Wilayah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Indeks Williamson sebagai alat ukur dikarenakan metode ini digunakan bukan hanya untuk mengukur ketimpangan antar negara tetapi juga ketimpangan antar daerah di suatu negara. Penghitungan nilai ini didasarkan pada indeks variasi (CV) dan Williamson memodifikasi perhitungan ini dengan menimbanginya dengan proporsi penduduk wilayah.

$$VW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \cdot f_i / N}}{Y} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

Y_i = PDRB per kapita daerah i

Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Indeks Williamson berkisar antara $0 < VW < 1$,



HASIL DAN PEMBAHASAN

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.868482	(23,141)	0.0000
Cross-section Chi-square	161.154894	23	0.0000

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	90.345239	3	0.0000

Ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dihitung dengan menggunakan metode perhitungan Indeks Williamson. Data yang diperlukan antara lain data Pendapatan Asli Daerah provinsi (PAD) dan kabupaten/kota, Angkatan Kerja (AK) provinsi dan kabupaten/kota dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi dan kabupaten/kota. Dimana menurut Sjafrizal (2012) apabila nilai indeks williamson mendekati angka 1 maka ketimpangan yang terjadi cenderung tinggi dan semakin menjauh dari angka 1 ketimpangan yang terjadi cenderung rendah. Berdasarkan olah data antara PAD, AK dan IPM maka diperoleh hasil Indeks Williamson (IW) sebagai berikut:

Tabel 2. Indeks Williamson

TAHUN	INDEKS WILLIAMSON (%)
2010	0,363
2011	0,365
2012	0,348
2013	0,361
2014	0,361
2015	0,360
2016	0,360

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data tabel 2. Indeks Williamson diatas, diketahui nilai indeks williamson (IW) Propinsi Sulawesi Selatan selama periode 2010 sampai dengan 2016 bernilai 0,36, hanya pada tahun 2013 saja terjadi penurunan nilai IW sebesar



0,348. Jika melihat nilai Indeks Williamson secara rata-rata dari tahun 2010-2016, maka dapat diindikasikan bahwa nilai kesenjangan yang terjadi di Propinsi Sulawesi Selatan masih cukup tinggi (angka IW mendekati angka 1). Tingkat ketimpangan wilayah yang cukup tinggi ini terjadi karena kegiatan perekonomian maupun pembangunan hanya berpusat di beberapa wilayah seperti Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Pinrang. Pada daerah-daerah lain seperti Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Tana Toraja masih memiliki PDRB perkapita yang kecil.

Selain itu, selama kurun waktu 16 tahun terakhir kontribusi Kota Makassar dan Kabupaten Luwu Timur terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tetap dominan. Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi karena struktur perekonomian Kota Makassar umumnya didorong oleh sektor tersier yakni industri, jasa dan perdagangan sedangkan struktur perekonomian Kabupaten Luwu Timur di dorong oleh sektor pertambangan. Sementara 22 kabupaten/kota lainnya umumnya didorong oleh sektor primer yakni sektor pertanian. Sektor industri, jasa dan perdagangan merupakan sektor yang paling besar menciptakan nilai tambah dibandingkan sektor pertanian. Apalagi elastisitas penyerapan tenaga kerja di tiga sektor ini lebih besar dibandingkan sektor pertanian. Artinya, nilai daya tambah produksi pertanian lebih kecil di bandingkan dengan nilai daya tambah sektor-sektor lainnya, sehingga daerah-daerah yang memiliki basis ekonomi disektor non pertanian memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Penelitian ini dibuktikan oleh penelitian Reniwati dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Sektor-sektor Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2007-2011 yang menyatakan bahwa sektor pertanian berada pada sektor yang tidak berkembang sehingga nilai ekonominya lebih kecil di bandingkan sektor-sektor lain yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi dari pertanian.

Tabel 3. Hasil Analisis Views



Variabel	Koefisien	Standar Error	t-statistic	Probabilitas
Konstanta	0.299081	0.081539	3.667.960	0.0003
PAD	-5.88E-14	2.64E-14	-2.225.371	0.0276
AK	3.66E-07	6.46E-08	5.667.853	0.0000
IPM	0.000202	0.001238	0.163041	0.8707
Prob(F-statistic)	0.000000			
Adjusted R-squared	0.959172			

1. Pendapatan Asli Daerah dan Ketimpangan wilayah.

Pada tabel diatas dapat dilihat nilai koefisien Pad sebesar -5.88E-14 dengan probabilitas sebesar 0,0276 lebih besar dari $\alpha=0,05$ menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan di Sulawesi Selatan, artinya apabila terjadi kenaikan pendapatan asli daerah senilai 1% akan menyebabkan turunnya ketimpangan wilayah sebesar 0,0276 atau 2,76%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan PAD memberikan dampak pada turunnya ketimpangan wilayah di daerah Sulawesi Selatan. Hal ini senada dengan penelitian Aprianoor, et al (2015) tentang kajian ketimpangan wilayah Propinsi Jawa Barat menyatakan bahwa Perbedaan pendapatan asli daerah tentu sangat mempengaruhi performa perekonomian suatu wilayah. Pendapatan daerah dapat membiayai pembangunan-pembangunan yang dilakukan di wilayah tersebut. Menurut Siddik, et al (2002) menyatakan bahwa kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan pendapatan yang sangat beragam, mempengaruhi kemampuan daerah tersebut dalam proses pembangunan.

2. Angkatan Kerja dan ketimpangan wilayah

Pada tabel diatas dapat dilihat nilai koefisien angkatan kerja sebesar 3.66E-07 dengan probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari $\alpha=0,05$ menunjukkan angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan di Sulawesi Selatan. Artinya apabila angkatan kerja mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan meningkatkan ketimpangan wilayah sebesar 3,66%. Hal ini sesuai dengan teori Sjafrizal yang menyatakan bahwa akibat dari adanya migrasi yang kurang lancar, menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya. Akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.



3. Indeks Pembangunan Manusia dan ketimpangan wilayah

Pada tabel diatas dapat dilihat nilai koefisien IPM sebesar 0.000202 dengan probabilitas sebesar 0.8707 lebih besar dari $\alpha=0,05$ menunjukkan IPM tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Sulawesi Selatan. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa terjadi peningkatan IPM di Sulawesi Selatan namun kondisi ini tidak memberikan pengaruh terhadap ketimpangan wilayah disebabkan daerah-daerah di Sulawesi Selatan telah mengalami peningkatan IPM secara merata. Sebagaimana menurut Todaro (2011) IPM yang baik mampu mengurangi ketimpangan pada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Propinsi Sulawesi Selatan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengujian model menggunakan uji chow menunjukkan bahwa model FEM lebih tepat digunakan dari pada model PLS. Selanjutnya dengan dilakukannya uji Hausman menunjukkan model FEM lebih tepat digunakan dibandingkan dengan model REM.oleh karena itu, penelitian ini memutuskan menggunakan model FEM karena model FEM lebih tepat dari model PLS dan REM.
2. Hasil ujian koefisien determinan (R^2) menunjukkan besarnya nilai R-squared sebesar 0.959172 atau 95,92% artinya variabel dependen ketimpangan wilayah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model sebesar 95,92%, dan sisanya sebesar 4,08% variasi variabel ketimpangan wilayah (Y) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.
3. Hasil uji pengaruh (uji t) terhadap variabel dependen ketimpangan wilayah dilihat dari nilai probabilitas masing-masing variabel independen, bahwa variabel Angkatan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel PAD berpengaruh negatif dan signifikan dan variabel IPM tidak memiliki pengaruh.

Saran

1. Pemerintah perlu mengenali potensi yang terdapat dimasing-masing daerah karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda.



2. Pemerintah perlu menjalin kerjasama yang baik dengan daerah lain untuk meningkatkan pendapatan daerah serta melengkapi segala kekurangan yang ada dimasing-masing daerah.
3. Perlunya dilakukan studi banding untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kepada pegawai daerah guna meningkatkan pengetahuannya dalam melakukan terobosan-terobosan baru guna meminimalisir terjadinya ketimpangan wilayah di Propinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2005). Dasar-dasar Ekonomi Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. (2012). Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Angelia, Y. (2010). "Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008". Skripsi S-1 Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.
- Basuki Rahmat (2013). Analisis Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan Sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal 1990-2001. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2017. Produk Domestik Regional Bruto 2008-2014. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Bungin, Burhan. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group.
- Caska dan R.M Riadi. (2007). " Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Riau". <http://rmriadi.yolasite.com>. Diunduh Rabu, 25 Februari 2015.
- Denis Jakson Bimbin (2013), "Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011". Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



- Esquivel, G. (2010). "The Dynamic of Income Inequality In Mexico Since NAFTA". dalam jurnal Centro de Estudios Economicos No.IX-2010. El Colegio de Mexico.
- Ezcurra, Roberto dan Andres Rodriguez-pose. 2013. "Does Economic Globalization affect Regional Inequality? A Cross-country Analysis". dalam jurnal Word Development. Vol. 52. hlm. 92-103.
- Filzah wajdi (2011). "Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Sulawesi-Selatan" Institut Pertanian Bogor 2011.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Glasson, John. 1977. Pengantar Perencanaan Regional. Jakarta: LPEE-UI.
- Hartono, B. (2008). "Analisis ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi jawa tengah". Tesis S-2 Prodi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.
- Herwin Mopangga (2010). Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo". Pascasarjana Institute Pertanian Bogor.
- Kutscherauer, Alois, dkk. 2010. Regional Disparities In Regional Development of the Czech Republic. Ostrava: Universitas Teknik Ostrava.
- Lustiawaty Achmad (2017). "Analisis Konvergensi dan Keterkaitan Spasial Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Pascasarjana Universitas Tadulako
- Marleni Rias Fitrianasari (2016). "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Wilayah Subosukowonosraten Periode 1990-2014". Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016.
- M.L. Jhingan, Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, PT Rajagrafindo persada, 2014.
- Muhammad Ahadismal (2012). "Disparitas Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Perencanaan Pengembangan Wilayah, Universitas Hasanuddin".



- Muhammad Haris Hidayat (2014). "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012". Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang 2014.
- Nisa, Aulia Afafun. 2017, " Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur". Jurnal Ilmu Ekonomi.
- Puji Lestari dan Dhiah Fitrayati, "Pengaruh Belanja Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kediri". Universitas Kelintang Surabaya. Nugroho,
- I. Dan Rochimin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta : LP3ES.
- Puspanдика, Bery Agung. (2007). "Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Era Otonomi Daerah: Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kesejahteraan Masyarakat". Skripsi S-1 Departemen Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor.
- Regional Disparities and Cohesion: What Strategies For The Future. 2007. Directorate-General For Internal Policies of the Union. Brussels: European Parliament.
- Rustiadi, Ernan, dkk. (2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Crestpent Press.
- Santoso, Singgih. 2004. Buku Latihan Statistik Multivariat. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sidik, Mahfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah : Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Disampaikan pada seminar "Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia", Yogyakarta.
- Sirojuzilam. (2005). Beberapa Aspek Pembangunan Regional. Bandung: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- Sjafrizal. (2008). Ekonomi Regional (Teori dan Aplikasi). Padang: Praninta Offset.
- Sjafrizal. (2012). Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.



- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. Membangun Perekonomian Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Todaro, P. Michael. 2011. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga
- Undulifolia, Crossandra. (2012). "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009". Skripsi S-1 Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.
- Wildany, Zulham. (2011). "Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan Di Kabupaten Lamongan". Skripsi S-1 Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Brawijaya Malang.
- Yunus, Hadi Sabari. (2010). Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar